



## #5

# Menelisik Simpang Regsosek di Kabupaten Sampang: Refleksi Kualitatif

Nyi R Irmayani & Pratiwi

### A. Mencatat untuk Membangun Negeri

“Selamat datang Mbak di Kabupaten Sampang, kira-kira ini pertimbangannya apa, mengapa Kabupaten Sampang dijadikan salah satu lokus yang mewakili Provinsi Jawa Timur?”, demikian ungkapan salah satu perangkat BPS menyambut Tim Peneliti. Proses pengumpulan data berlanjut pada sejumlah permasalahan pembangunan di Kabupaten Sampang. Berdasarkan data pada dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019–2024, Kabupaten Sampang termasuk kabupaten dengan rasio kemiskinan tertinggi, yakni 22,78% (Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2020). Selain persoalan kemiskinan, Kabupaten Sampang juga menghadapi persoalan malnutrisi dan rendahnya partisipasi sekolah.

---

N. R. Irmayanti,\* & Pratiwi

\*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nyir001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Irmayanti, N. R., & Pratiwi. (2023). Menelisik simpang regsosek di kabupaten Sampang: refleksi kualitatif. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (127–166). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c707 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Keberadaan data empiris mengenai kondisi sosial ekonomi di suatu daerah berguna bagi dasar-dasar penyusunan kebijakan di berbagai bidang, salah satunya sosial dan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan tantangan sosial dan ekonomi terberat, pemilihan Kabupaten Sampang sebagai lokus inti dari pendataan sosial dan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Pendataan tersebut mencakup keluarga yang tinggal di wilayah pemukiman atau perumahan, keluarga yang ada di kawasan elite dan apartemen, serta lingkungan panti. Kemudian, keluarga yang tinggal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), suku terasing, dan barak militer. Lokasi pendataan di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang merupakan pemukiman masyarakat nelayan dan petani, sebagian lagi adalah pemukiman karyawan serta pedagang.

Pada pendataan tersebut, setiap keluarga diwawancarai dengan menggunakan moda *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI) atau lebih dikenal dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner cetak. Selain itu, petugas akan menandai koordinat lokasi pada setiap bangunan tempat tinggal. Petugas juga melakukan pengambilan foto bangunan tempat tinggal khusus untuk keluarga kurang sejahtera sesuai pengakuan ketua atau pengurus lingkungan setempat. Pendataan Regsosek mengumpulkan sejumlah variabel, yang meliputi informasi terkait kondisi sosio ekonomi, demografis, kondisi perumahan, sanitasi air bersih, kepemilikan aset, serta kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus. Selanjutnya, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi terkait kondisi ekonomi lainnya.

## **B. Kehidupan yang Bergantung pada Kebaikan Alam**

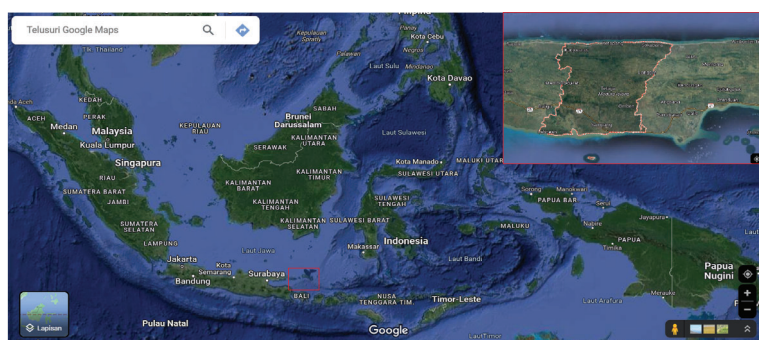
Dalam perjalanan menuju Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, hutan-hutan kecil tampak rimbun, kemudian diikuti hutan mangrove, dan juga pantai. Transportasi publik yang dapat diandalkan dari desa menuju pusat kota maupun

Kota Surabaya hanya bus antar kota yang tidak menentu waktunya atau sewa mobil. Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong di Kabupaten Sampang merupakan salah satu desa yang berada di Pulau Madura dimana mayoritas penduduknya tinggal di wilayah pesisir. Setiap sore, terlihat hiruk pikuk para perempuan yang menggerakkan perekonomian keluarga dengan berjualan sehingga kondisi jalan lebih ramai pada sore hari. Meski demikian, pendapatan mereka tidak menentu.

Kondisi alam yang tidak produktif secara langsung berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih tergantung pada alam, yaitu perikanan. Menurut keterangan PJ Kades Dharma Tanjung,

“Sebanyak 60% mata pencaharian penduduk di desa ini adalah nelayan dan buruh nelayan, sisanya petani, buruh tani, dan pedagang. Walaupun ada juga yang bekerja di pertanian dan peternakan, tapi perikanan laut memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.” (Wawancara PJ Kader Dharma Tanjung, 1 November 2022)

Secara geografis, Kecamatan Camplong menjadi salah satu dari titik-titik kemiskinan di Kabupaten Sampang. Selain bergantung pada hasil laut, penduduk Desa Dharma Tanjung di sebelah Utara desa



Sumber: Google (t.t.)

**Gambar 5.1** Peta Kabupaten Sampang



Foto: Yumantoko (2022)

**Gambar 5.2** Aktivitas sore penduduk nelayan Desa Dharma Tanjung yang berjualan ikan.

bercocok tanam jagung, tembakau, cabai, dan jenis sayuran lainnya dengan sistem pertanian lahan kering.

Sejarah Desa Dharma Tanjung tidak terlepas dari sejarah masyarakat Tanjung di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Desa ini berdiri sejak 1922. Desa adalah kumpulan dari beberapa pemukiman penduduk yang biasanya disebut kampung. Desa ini memiliki enam dusun yaitu, Tanjung, Manceng, Deman, Dengkah, Majeng, dan Pandiya. Desa Dharma Tanjung terletak kurang lebih 8 km dari Kecamatan Camplong. Sejak Desember 2021, desa ini dipimpin oleh PJ Kades yang ditunjuk dari kecamatan karena belum ada pemilihan kepala desa sampai menunggu pemilihan serentak.

Jarak Desa Dharma Tanjung ke kecamatan sekitar enam kilometer. Desa ini merupakan salah satu desa pesisir di Selat Madura dengan mayoritas sebagai nelayan terbesar di Kecamatan Camplong, yaitu sebesar 7.643 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.022 per km<sup>2</sup> (BPS

Kabupaten Sampang, 2022). Wilayah desa dibagi dua bagian, yaitu pesisir termasuk padat penduduk dibandingkan wilayah pesisir lain di Kecamatan Camplong.

Nelayan di Desa Dharma Tanjung sangat tergantung pada hasil melaut, tetapi tidak semua nelayan mempunyai perahu sendiri. Banyak yang sebagai buruh nelayan yang menyewa perahu dengan yang mempunyai perahu dan hasilnya dibagi beberapa orang yang membantu melaut. Nelayan juga tidak dapat melaut pada musim tertentu, seperti musim angin atau purnama. Hasil penangkapan yang dibawa nelayan akan dijual oleh para istri nelayan. Lokasi berjualan yang digunakan ialah di pinggir jalan raya desa yang merupakan jalur utama transportasi lintas Pulau Madura sehingga pada sore hari ramai dan macet oleh penjual dan pembeli. Nelayan pada umumnya tidak mempunyai simpanan karena habis untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah sedikit-sedikit, seperti untuk lantai dan tembok keramik. Alasannya apabila tidak disemen dan dikeramik maka akan terkikis air laut.

Bagaimana keadaannya pada saat nelayan tidak melaut? Hal ini yang menjadi permasalahan utama. Nelayan yang tidak mendapatkan penghasilan tambahan akhirnya berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nelayan berhutang kepada orang-orang yang keliling menawarkan pinjaman untuk kebutuhan pangan apabila sedang musim tidak melaut dan dibayar pada saat hasil laut terjual. Pembayaran hutang dicicil sesuai kesepakatan dengan yang memberi pinjaman. Istri-istri nelayan turut membantu dengan menjual makanan, seperti gorengan keliling dusun atau mempunyai warung kecil di depan rumahnya. Namun, banyak istri-istri nelayan yang juga hanya menunggu suaminya datang dari melaut dan memilah-milah ikan yang bagus untuk dijual di pinggir jalan.

Ketergantungan pada alam masih menjadi tantangan bagi berbagai pihak untuk mengambil andil memberikan program-program peningkatan kapasitas masyarakat. Edukasi lain yang diperlukan adalah pengelolaan sampah dan tempat MCK umum di daerah pesisir seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat



Foto: Yumantoko (2022)

**Gambar 5.3** Aktivitas sore penduduk nelayan Desa Dharma Tanjung mengambil ikan dari melaut.

agar masyarakat tidak membuang kotoran di sungai atau ke pantai lagi. Hal ini penting karena daya serap warga terhadap pengetahuan baru akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) dalam bidang pendidikan. Staf BPS telah menyarankan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kejar paket.



Foto: Peneliti (2022)

**Gambar 5.4** Pemukiman Rumah-Rumah Nelayan

Permukiman nelayan di Desa Dharma Tanjung terlihat sangat padat, rumah berdekatan-dekatan, tidak ada ruang kosong. Kondisi hunian sebagian besar masyarakat tampak tidak memiliki fasilitas sebagai syarat rumah sehat dan nyaman. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti air bersih, drainase, pelayanan sampah, sanitasi, serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat nelayan. Hanya sebagian rumah di pesisir pantai memiliki fasilitas tempat untuk buang air (WC). Warga Dusun Manceng mengungkapkan bahwa warga buang air menjelang subuh ke pantai. MCK sebelumnya sudah dibangun di dekat pasar dengan dua pintu kamar mandi, tetapi sudah tidak terawat dan tidak dialiri air lagi sehingga warga akhirnya kembali ke pantai untuk buang air. Sungai yang tertimbun sampah juga terlihat di Dusun Dangkah. Sampah berserakan menutupi sungai kecil sehingga apabila hujan, rumah-rumah di dusun ini banjir sampai selutut orang dewasa. Menurut PPL yang bertugas di dusun ini, sungai pernah dikeruk dan bersih, pernah juga ada tempat pembuangan sampah, tetapi karena tidak ada perawatan dan biaya bagi petugas yang mengangkut akhirnya terbengkalai.



Foto: Pratiwi (2022)

**Gambar 5.5** MCK warga terbengkalai dan pengelolaan sampah yang kurang sehat di Desa Dharma Tanjung.

Tingkat pendidikan di desa ini masih rendah karena kebanyakan anak-anak muda lebih suka melaut dan mendapatkan uang daripada ke sekolah walaupun pada akhirnya lulus minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Kejar Paket A disediakan di desa karena indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli berpengaruh besar terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Sektor kesehatan di desa dapat diakses oleh warga. Warga dapat mengakses fasilitas kesehatan karena adanya kebijakan Bupati Sampang yang menyatakan bahwa setiap warga yang memiliki KTP dan KK Sampang dapat berobat ke Puskesmas. Selain pendidikan, aspek kesehatan menjadi isu yang relevan untuk desa ini. Konsumsi makanan masyarakat desa sangat sederhana karena masyarakat lebih memilih membeli aset pada saat tangkapan ikan bagus, seperti memperbaiki rumah dengan keramik maupun membeli ternak atau sawah. Hal ini yang membuat IPM daerah Sampang terbelah rendah.

Selain desa nelayan, 40% wilayah utara merupakan daerah pertanian sawah tadah hujan yang mengandalkan air hujan untuk sawahnya sehingga hanya dapat panen setahun sekali. Mayoritas warga menjadi buruh tani dan tidak memiliki lahan. Selain lahan persawahan, masyarakat juga memelihara ternak, seperti ayam atau kambing. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari selain nasi ialah sayur-sayuran, seperti bayam, kubis, dan ikan bahkan jarang mengkonsumsi protein. Kesederhanaan konsumsi makanan ini sudah menjadi tradisi karena lebih mengutamakan kepemilikan aset daripada membeli makanan yang memenuhi unsur empat sehat lima sempurna.

Masyarakat Desa Dharma Tanjung bagian Utara sebagian besar merupakan petani. Rumah-rumah antar warga memiliki jarak yang lebih luas dibandingkan rumah warga di daerah selatan. Keberadaan jamban juga lebih baik kondisinya dibandingkan jamban di kampung nelayan. Meskipun kondisi jamban terpisah dengan rumah dan dimiliki oleh lebih dari satu kepala keluarga (KK), mayoritas jamban pada wilayah ini merupakan jamban leher angsa yang tertutup dan dikelilingi tembok. Pengelolaan sampah pada daerah ini juga terlihat lebih bersih karena tidak dibuang sembarangan, melainkan



dikumpulkan atau dibakar. Muncul stigma yang berbeda antara wilayah selatan dan utara diungkapkan oleh PPL.

“Penduduk di bagian utara karakternya lebih jarang berhutang dan rumahnya lebih teratur. Saya sebagai bagian dari mereka *mikir-mikir* lama dahulu sebelum berhutang. Mungkin karena dipengaruhi oleh mata pencaharian dan kondisi geografis. Kedekatan dengan laut dan tereksposnya rumah-rumah dengan air laut membuat rumah lebih mudah rusak. Maka dari itu, mereka memerlukan sumber daya lebih untuk membangun rumah tembok dan keramik.” (Wawancara PML E, 3 November 2022)



**Gambar 5.6** Pemukiman Petani, Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang  
Foto: Pratiwi, 2022



**Gambar 5.7** Lahan Pertanian Warga di Daerah Pertanian, Desa Dharma Tanjung  
Foto: Pratiwi, 2022

Masyarakat Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong Sampang Madura sedang bersiap-siap akan menggelar Tasyakuran berupa *Rokat Tase* atau Petik laut yang biasanya berlangsung dua hingga tiga hari. Kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintahan Desa itu akan digelar tanggal 10–12 November 2022 di Instalasi Pelabuhan Perikanan Dharma Camplong. *Rokat Tase* ditandai dengan membuang kepala sapi oleh tokoh masyarakat, serta warga sekitar ke laut menggunakan perahu nelayan. Puluhan perahu nelayan ikut mengantar perahu yang mengangkut kepala sapi dan makanan sambil diiringi musik tradisional Madura *Klenangan*. Sebelum ritual membuang kepala sapi, para pengantar hiruk pikuk menikmati suara merdu sinden di atas perahu.

Menurut Ketua Pelaksana yang juga Sekretaris Desa mengatakan, “Tasyakuran dan *Rokat Tase* itu sebagai wujud syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang melimpah. Kegiatan itu merupakan tradisi leluhur yang turun temurun dilaksanakan warga masyarakat pesisir.” Menurut PJ Kepala Desa Dharma Tanjung,

“*Rokat Tase* adalah kegiatan rutin setiap tahun yang melibatkan tokoh masyarakat serta warga sekitar. Bahkan, warga dari desa lain ikut meramaikan dan mengantar iringan perahu sampai ke laut. Ia berjanji akan terus melestarikan tradisi yang ada di masyarakat karena merupakan warisan dari leluhur. *Rokat Tase* merupakan tradisi masyarakat pesisir yang perlu dilestarikan. Sebab, tujuannya positif sebagai wujud syukur dan memohon keselamatan bersama dalam menjalankan tugas bekerja di laut untuk kepentingan keluarga.” (Wawancara PJ Kepala Desa Dharma Tanjung, 1 November 2022)

Ditengah kesulitan dan keterbatasan hasil laut, masyarakat desa tetap melaksanakan acara Petik laut dengan menyumbangkan secara sukarela dan mencari donatur demi suksesnya acara tersebut. Sekretaris desa bahkan turut memeriahkan kegiatan dengan mencari donatur. Namun, dibalik meriahnya pesta laut, ada sisi keagamaan yang dibawa, seperti acara pengajian dan bacaan shalawat Nabi. Ada



Foto: Pratiwi (2022)

**Gambar 5.8** Petik Laut Desa Dharma Tanjung

juga pentas seni, seperti tarian dan alat musik tradisional serta organ tunggal.

Permasalahan lain yang dihadapi ialah Kabupaten Sampang merupakan daerah yang paling rawan bencana di Jawa Timur dengan risiko bencana banjir yang disebabkan permasalahan di daerah aliran sungai. Dalam konteks warga Desa Dharma Tanjung, kini mereka dapat sedikit lega karena persoalan persampahan dan daerah aliran sungai telah tertangani setelah bertahun-tahun sebelumnya tidak ada kejelasan. Hadirnya figur muda sebagai perangkat desa yang pulang ke desa setelah menempuh pendidikan tinggi dan dipercaya banyak warga, cukup berkontribusi untuk menyampaikan aspirasi warga. Keberadaan figur tersebut cukup krusial dengan karakter pendidikan tinggi, partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah desa dan dipercaya oleh warga desa.

### **C. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Regsosek**

Tantangan utama pelaksanaan Regsosek di Sampang terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam rapat IPM, diskursus bersama perangkat BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Bupati Sampang secara frekuentif membahas rendahnya capaian IPM, yakni pada angka 62 dari target awal 64.

Dalam penghitungan IPM, terdapat beberapa indikator, seperti daya beli, pendidikan, dan kesehatan. Perangkat BPS merekomendasikan dari sisi pendidikan, yakni dengan pemerataan program kejar paket A di semua desa. Menurut perangkat BPS, target 1.700 orang untuk peserta kejar paket A masih terlalu rendah terutama untuk penduduk usia lansia. Permasalahan kedua, yakni pada sisi kesehatan.

“Masalah kesehatan berada di peringkat 5 terbawah. Kenapa Sampang terendah karena penghitungannya makro hitung konsumsi, dan di Sampang makannya seadanya namun mempengaruhi kalori. Kalori rendah, pengeluaran konsumsi rendah. Kalau ada empat sehat lima sempurna, setiap kesempatan kami sampaikan makan tahu tempe.” (Wawancara dengan perangkat Kabupaten Sampang, 3 November 2022)

BPS Kabupaten Sampang turut terlibat dalam diskusi dan upaya penyelesaian masalah di Kabupaten Sampang yang dipimpin oleh Bupati. Saran yang disampaikan BPS juga terkait dengan peningkatan IPM. Meski demikian, selama perhitungan IPM berdasarkan makro konsumsi maka IPM Kabupaten Sampang akan tetap dinilai rendah. Hal ini terkait dengan budaya masyarakat Sampang dari segi asupan protein. Terkait pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Sampang, Kepala BPS Kabupaten Sampang menyebutkan,

“Total calon petugas yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.468 orang yang terdiri dari Koseka, PPL, dan PML. Selama dua hari, petugas pendataan Regsosek akan menerima materi terkait konsep dan definisi yang digunakan dalam pendataan tersebut. Keceragaman konsep tersebut diperlukan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibandingkan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pelatihan ini menjadi awal dari pendataan Regsosek karena lapangan merupakan ujung tombak dalam pengumpulan data sosial ekonomi yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam melakukan pendataan, nantinya setiap empat orang Petugas Pendataan Lapangan (PPL) akan diawasi satu Pengawas Pemeriksa Lapangan (PML). PML ini akan

bertugas mengawasi kegiatan lapangan dan memeriksa isian kuesioner yang dihasilkan oleh PPL. Memastikan kebenaran isian dan konsistensi masing-masing jawaban menjadi tugas PML agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam melakukan pendataan, nantinya setiap empat orang petugas pendataan lapangan (PPL) akan diawasi satu pengawas pemeriksa lapangan (PML).” (Wawancara Kepala BPS Sampang, 3 November 2022)

Selanjutnya ditambahkan oleh Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang mengatakan,

“Permasalahan di Madura, terutama Sampang, angka kemiskinan ingin ditekan, tetapi dari desa ingin mengangkat karena ingin dapat bantuan. Selama ini banyak juga yang tidak tepat sasaran ini karena desa seperti raja kecil yang menentukan data. Sering kali ketika diminta itu, pengawasan itu penting, semuanya kan sudah dapat dana, tapi kenapa hasil beda-beda, karena ya kurang pengawasan.” (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang, 3 November 2022)

“Program ini untuk mendata seluruh penduduk Sampang dari sisi sosial dan ekonominya. Pendataan akan dilakukan secara komprehensif mulai dari bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan. Setiap warga akan ditanyakan perihal usia, pekerjaan, pendapatan, aset, kondisi rumah, jenis bantuan sosial (bansos) yang diterima, jenis jaminan kesehatan yang dimiliki, dan sebagainya. Pendataan dilakukan secara lengkap. Bahkan lebih lengkap dari program Basis Data pada tahun 2015.” (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang, 3 November 2022)

Program basis data pada tahun 2015 hanya mencakup 40 persen, sedangkan Regsosek mencakup keseluruhan penduduk didata, yaitu 100 persen. Oleh sebab itu, Regsosek ini membutuhkan banyak tenaga

untuk melakukan pendataan ke lapangan sehingga BPS merekrut sebanyak 1.475 tenaga untuk memudahkan proses pendataan. Bahkan, tenaga Regsosek direkrut dari setiap desa. Untuk mendaftar sebagai tenaga Regsosek, calon pendata harus melampirkan surat rekomendasi dari masing-masing kepala desa. Setelah selesai melaksanakan pendataan, tenaga Regsosek menerima honor setiap bulan. Bahkan, dari anggaran Rp10 miliar untuk Kabupaten Sampang sebanyak Rp8 miliar diperuntukkan honor petugas Regsosek. Perbandingan setiap pendata, yaitu satu banding 250 keluarga.

BPS Kabupaten Sampang merasa dilema pada saat perekrutan petugas. Kandidat mahasiswa dipandang akan memberikan kontribusi positif, tetapi disisi lain memiliki kelemahan, yaitu tidak mengenal lokasi dan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, BPS Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada para kepala desa untuk merekrut warga setempat menjadi petugas dengan alasan petugas tersebut mengetahui kondisi masyarakatnya, mengetahui kepemilikan aset warga yang ada di desanya. Kepala desa diharapkan bertanggungjawab atas petugas yang direkomendasikan. Dukungan kepala desa juga turut menjaga agar komitmen petugas pendata tetap terjaga.

## 1. Proses Persiapan

Awalnya pelaksanaan Regsosek dibatalkan setelah tanggal 17 Agustus 2022, tetapi beberapa hari kemudian ada pemberitahuan dari BPS pusat bahwa kegiatan akan dilanjutkan. Pada saat itu belum adanya informasi terkait anggaran pelaksanaan. Kondisi ini membuat semangat pihak-pihak yang terlibat menjadi tidak menentu dengan waktu yang sempit dan harus merekrut, serta melatih banyak petugas karena harus mendata semua warga masyarakat (*take all*).

Proses awal adalah perekrutan calon petugas dengan persyaratan adalah menyerahkan dokumen KTP dan ijazah untuk melihat tempat tinggal calon tersebut yang akan ditugaskan di lingkungannya sendiri. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang mengatakan,

“Pelatihan di Surabaya menampung sebanyak 1.475 orang yang dibagi menjadi lima gelombang. Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Hotel Alana & Arya Sentra sebanyak 59 kelas. Pelatihan berlangsung sejak 26 September–11 Oktober 2022. Untuk satu gelombang dilakukan selama empat hari dengan dua hari efektif. Selama pelatihan, kami menyiapkan dokumen PK 1, yaitu surat untuk ke lapangan dan instrumen pendataan. Pada tanggal 11 persiapan surat selesai. Pada tanggal 13 seluruh dokumen di bawa ke kecamatan, diantaranya surat PK 1, surat ke desa, surat tugas, dan *name tag* sudah kami bekali semua. Setelah itu, pada tanggal 15 pendataan dimulai. Pendataan terdiri dari dua tahapan verifikasi keluarga, yaitu melalui ketua SLS terkait keberadaan keluarga dan kondisi sosial ekonomi warga dan data skoring.” (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang, 3 November 2022)

Calon petugas mendapat pelatihan mengenai pencacahan, seperti masyarakat yang baru menikah tetapi belum mempunyai dan mengurus kartu keluarga (KK) atau sudah membuat KK, tetapi masih dalam proses. Selain itu, pelatihan dalam penentuan kategori miskin atau sangat miskin. Setelah proses tersebut, petugas dapat melakukan pendataan *door to door*. Tugas selanjutnya, apabila ada keluarga yang ditentukan miskin dan sangat miskin maka dilakukan pengambilan foto dan *tagging* lokasi, dan bagi keluarga yang tidak miskin cukup *tagging* saja dengan menggunakan aplikasi ponsel yang diajarkan selama pelatihan. Kemudian, calon petugas juga diberi penjelasan mengenai haknya berupa honor dan fasilitas yang diterima.

## **2. Pelaksanaan dan Kendala Regsosek Sampang**

Tahapan pelaksanaan pendataan terutama mengenai penentuan miskin dan tidak miskin oleh Kepala Dusun sebenarnya sangat subjektif tetapi tidak dapat dibantah oleh BPS karena ketentuannya seperti itu. Hal ini dinyatakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang,

“Tahapan verifikasi keluarga *door to door* apabila mampu dilakukan *tagging*. Sebenarnya foto tidak ngaruh, yang ngaruh isiannya, misal lantai keramik tapi penghasilannya di bawah standar. Itu kan dari pelatihan dari Kepala Dusun ya miskin ya sudah. Data ini hanya untuk verifikasi, informasinya ini status miskin/tidak, pemerintah ingin tahu bagaimana persepsi warga setempat. Kita dapat peringatan kalau menurut kadus miskin tapi menurut data tidak miskin, ya kita tidak boleh mengubah. Petugas tidak boleh mengubah karena hal ini subjektif.” (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial Regsosek Sampang, 3 November 2022)

Beberapa kendala yang ditemukan selama proses pendataan.

- a. Adanya aplikasi kedua yang tidak diajarkan selama pelatihan. Petugas pendataan banyak yang mengkritisi kebijakan yang berubah-ubah. Aplikasi kedua juga tidak diajarkan penggunaannya dalam pelatihan. Petugas akhirnya belajar mandiri untuk memahami fungsi dan fitur aplikasi. Dengan adanya tambahan aplikasi, BPS Kabupaten Sampang membuat video tutorial yang dapat dipelajari oleh petugas pendataan. Selain penggunaan aplikasi, permintaan untuk mengambil gambar/foto kondisi rumah warga dipandang menyulitkan pendataan. Petugas sudah melakukan pendataan sejumlah setengah dari target pendataan. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Sampang mengatakan,

“Ada petugas pendataan juga yang mogok mengancam tidak melakukan tugas, tetapi akhirnya tetap melaksanakan tugas. Saya tekankan yang penting pendataan selesai.. Pendataan di masa mendatang semoga lebih lancar karena kami sudah melibatkan mitra dengan jumlah masif. Jangan sampai ada permintaan data tambahan saat proses pendataan masih berlangsung karena perlu mempertimbangkan banyak hal. Kalau ada PPL yang menolak maka dapat berpengaruh pada pemutusan kontrak. Peraturan perjanjian, seperti pasal karet karena di perjanjian petugas pendata harus melaksanakan sesuai prosedur awal dan ditambah tugas tambahan dari BPS ini yang karet. Pelaksanaan aturan tambahan



saat berhadapan di level bawah ini sulit. Sementara kami terus melakukan percepatan setiap hari ini agak tidak ada yang mogok para mitra kami. Pendataan sudah berjalan hampir separuh target tetapi adanya tambahan tugas, yaitu tambahan data maka petugas perlu kembali ke awal lagi untuk memenuhi data yang diminta untuk ditambahkan. Pendataan awal, dua tiga hari progresnya lambat, sekarang sudah stabil lagi.” (Wawancara Koordinator Fungsi Statistik Sosial Regsosek Sampang, 3 November 2022)

- b. Adanya penolakan dari masyarakat yang didata (*non-response*) dan diambil foto dalam rumahnya. Berbagai cara dan pendekatan dilakukan petugas, seperti meminta warga sendiri yang mengambil foto dan menjelaskan alasan pengambilan foto dalam rumah. PPL berusaha menjelaskan bahwa persyaratan ini diharuskan dari BPS pusat untuk membuktikan bahwa rumah yang difoto benar-benar sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
- c. Penolakan lain yang dihadapi petugas adalah dari kalangan masyarakat yang menjadi lawan politik kepala desa terpilih. Warga menganggap petugas pendataan adalah orang suruhan kades, walaupun sudah dijelaskan dan diperlihatkan surat tugas dan lain-lain, tetapi tetap menolak memberikan data-datanya. Padahal BPS Kabupaten Sampang telah berkirim surat sebelumnya kepada camat dan kades mengenai adanya pendataan Regsosek.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Sampang dapat diatasi oleh para pihak yang terkait. Para petugas di lapangan, yaitu Koseka, PML, dan PPL mengadakan pertemuan setiap minggu sampai di akhir pelaksanaan Regsosek. Pertemuan ini dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi data. BPS Kabupaten Sampang juga melakukan pendataan malam hari untuk warga yang tinggal di wilayah khusus dan bagi warga yang tidak menetap. Kriteria wilayah khusus misalnya penduduk yang menetap di apartemen, pesantren, penjara, dan pengungsian. Kemudian pada malam hari,

pendataan dilakukan kepada warga yang tidak memiliki tempat tinggal seperti tunawisma.

#### **D. Nilai Positif dan Tantangan Pendataan**

Petugas PPL di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang menanggapi positif kegiatan Regsosek. Hal tersebut ditandai dengan beberapa diksi selama wawancara yang sering terdengar, seperti sudah baik, sudah bagus, sesuai prosedur, dan mudah dipahami. Dalam melaksanakan tugas sebagai PPL, PPL A mengalami sejumlah kendala. Pertama, resistensi masyarakat yang disebabkan mereka yang kecewa belum mendapatkan bantuan sebelumnya. Dalam mengatasi kendala tersebut, kemampuan mendengarkan dan memberikan pemahaman adalah hal yang penting. Kedua, ada beberapa responden yang tidak ingin memberikan KK karena mereka menunggu keputusan kepala keluarga atau resisten karena bagian dari oposisi kepala desa. Ketiga, terdapat anggota keluarga yang sudah tinggal bertahun-tahun di desa, tetapi tidak memiliki KK. Untuk mengatasi hal tersebut, PPL berdiskusi dengan PML dan memberikan solusi. Keempat, kendala yang menurutnya cukup menurunkan semangat banyak PPL adalah munculnya aplikasi baru pada pertengahan pendataan. Aplikasi baru ini berisi keterangan tambahan berupa gambar-gambar dalam pemukiman warga. Ia mengaku sungkan untuk mengambil foto dalam rumah warga.

“Mengambil foto depan rumah saja mereka sering menolak, apalagi mengambil foto ke dalam? Itu kan bagian dari privasi. Aplikasi kedua yang muncul pada tengah-tengah proses survei cukup memperlambat kinerja kami. Kami harus mengulang ambil foto dari urutan terdepan. Kadang ada responden yang tidak mau, ya saya minta foto sendiri, jika mereka tidak berkenan ya tidak saya paksa. Memperlambat kinerja, harus ngulang lagi dari depan. Sudahlah kita coba jalanin dulu, kalau ada kurang-kurangnya ya dipenuhi belakangan. Responden sendiri yang foto

akhirnya. Kalau mereka tidak mau, saya tidak paksa.” (Wawancara PPL A, 1 November 2022)

PPL A merasa bersyukur banyak dibantu oleh PML dalam pendataan. Seluruh PPL pun saling membantu dalam melaksanakan tugas. Apabila PPL tidak dapat menyelesaikan target pendataan maka rekan lainnya akan membantu sehingga ada PPL yang dapat melakukan pendataan hingga 600 KK. PPL B juga menghadapi resistensi dari warga. PPL B mengungkapkan, “Mereka yang tidak mau memberi KK malah dari masyarakat yang mampu dan juga oposisi kepala desa.” PPL B menghadapi kendala tersebut dan berdiskusi dengan PML. Resistensi lainnya, yakni mengenai pertanyaan penghasilan dan aset. PPL B mengungkapkan, “Banyak dari responden tidak berkata jujur. Misalnya, saya tahu di daerah Utara dia punya lahan, namun dia bilang tidak. Itu masyarakat yang menengah ke atas. Kalau mereka yang penghasilannya rendah, rata-rata menjawab jujur.”

PPL B juga memerlukan waktu tambahan karena responden sering menanyakan tujuan Regsosek dan pertanyaan lainnya mengenai bantuan. Hal-hal tersebut telah diantisipasi dengan pelatihan yang ia ikuti. Selain itu, adanya penambahan aplikasi baru yang muncul setelah ia mendapatkan banyak data.

“Sekarang saya sudah mengumpulkan data dari 169 KK dari target 390 KK. Sekarang sudah tanggal 3 November 2022, tenggat saya 12 November 2022. Harus mengulang dari awal dengan aplikasi ke dua. Kalau di Selatan masih dekat. Kalau ke Utara perlu menggunakan motor. Namun, pendataan saya tidak sampai jauh ke Utara sekali. Setiap KK biasanya saya menghabiskan waktu 15–20 menit. Satu hari biasanya saya 25 KK. Dari pendataan ini juga memberikan pemaknaan tersendiri bagi saya. Saya jadi tahu masyarakat daerah saya sendiri dan saling mengenal.” (Wawancara PPL B, tanggal 1 November 2022)

Menurut PPL B, pendataan Regsosek sangat penting sebagai basis data peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Foto: Pratiwi (2022)

**Gambar 5.9** Proses Diskusi PPL, PML, Koordinator Kecamatan bersama Tim dari BRIN

“Di Camplong ini sangat umum anak putus sekolah untuk membantu keluarganya mencari nafkah, seperti melaut. Saya dulu juga begitu karena keterbatasan. Jadi semoga pendataan ini dapat mengurangi persoalan seperti itu. Kendala terbesar selama pendataan, responden menolak memberikan data KK atau tidak mau menjawab soal aset bagi kalangan menengah ke atas khususnya bagi lawan politik kades. Ada sekitar 60 pertanyaan yang perlu dijawab warga dan apabila warga menolak menjawab maka petugas pendata membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menjelaskan kembali tujuan pendataan. Penulisan nama ada yang berbeda dengan kartu keluarga, PPL B mengikuti nama panggilan masyarakat bagi yang tidak mau menyerahkan kartu keluarga dan KTP (sekitar 5 kepala keluarga). Pengalaman selama pendataan, menjadi lebih tahu dengan kondisi masyarakat di wilayah sendiri. Sehari dari orang yang mau jawab dapat 25 KK, tapi apabila ada yang sulit jawab cuma 15 KK. Terlalu memakan waktu untuk memberikan penjelasan kepada responden. Penentuan KK yang didata sesuai urutan yang disyaratkan BPS. apabila tidak ada orangnya dapat janji ketemu. Apabila tidak ada KK maka boleh digantikan istrinya.” (Wawancara PPL B, 1 November 2022)

Seperti halnya PPL A dan PPL B, PPL C mengalami kendala setelah aplikasi kedua diluncurkan. PPL tersebut tidak begitu familiar dengan aplikasi telepon pintar dan pengoperasian aplikasi. PPL C mengungkapkan, “Kadang-kadang kalau akan unggah foto itu sulit sekali sinyalnya di sini. Tapi saya banyak dibantu PML. Tidak ada anggaran untuk paket data kuota.” Meski demikian, PPL C tidak mengalami kendala terkait warga. PPL mengatakan, “Partisipasi warga baik semua. Tidak ada yang resisten daerah sini”. Petugas lapangan tentunya bekerja dalam ranah struktur kerja untuk memperlancar pendataan.

Dalam proses Regsosek pada awal November 2022, tidak seperti PPL, PML D, sebagai salah satu PML tidak menjumpai kendala yang signifikan. PML direkrut berdasarkan pertimbangan sebagai mitra lama dari survei-survei BPS sebelumnya. Tantangan seperti resistensi responden adalah hal yang lumrah dan dapat ditangani. “Kendalanya paling yang dialami PPL. Ada beberapa responden yang tidak ramah dan saya dampingi mereka. Harus pintar-pintar ambil hati”, ungkap PML. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa bantuan pada masyarakat tidak hanya berbentuk tunai dan pemerintah pusat perlu mengetahui pendataan penduduk sebelum mengambil alternatif kebijakan. Dalam memberikan pemahaman pada responden dan masyarakat, beberapa cara PML D dalam melaksanakan tugas.

“Sebenarnya kunci dari mengambil hati responden adalah mendengarkan mereka dahulu. Tidak perlu kita jawab. Kita iyakan saja. Baru kalau ada pertanyaan, kita jawab. Jika mereka sibuk, kita tidak paksa. Saya juga berpesan pada PPL dan responden untuk menulis dan memberikan keterangan apa adanya. Memberi data yang benar itu ibadah. Siapa tahu ini membantu diri mereka sendiri bahkan kelompok yang lebih besar.” (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Pada beberapa kasus lain, terdapat responden yang menolak didata karena dikategorikan miskin. Kemudian, PPL melakukan verifikasi dengan data dari desa dan dusun. Kendala lain, yakni meningkatkan semangat PPL terutama setelah aplikasi kedua masuk.

“Saat capaian mereka sudah banyak, ada aplikasi kedua. Jadi, harus mengulang kembali. Ya tidak apa-apa. Ada PPL yang masih kurang capaiannya ya tidak apa-apa. Paling penting komunikasi dengan PPL setiap hari. Kita kadang kumpulkan mereka sambil bakar-bakar ikan dan evaluasi.” (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Bekerja dalam tim bagi PML D berarti kemauan untuk belajar dan menjaga semangat. Menurut PML D, Regsosek sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan kesesuaiannya dengan prosedur pendataan dan sesuai target KK.

“Menurut saya registrasi masyarakat memang perlu seperti ini. Prinsipnya hampir sama dengan SUSENAS. Indikatornya sudah lengkap menurut saya. Memang dari kuesioner nanti dapat terlihat setiap kategori kemiskinan. Jadi tidak perlu diperdebatkan.” (Wawancara PML D, 1 November 2022)

PPL dan PML dibantu Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Koseka E, informan lain menyatakan bahwa untuk memastikan pemahaman PPL mengenai pendataan ini, ia meminta mereka untuk mengisi kuesioner dan mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. “Sehingga mereka paham konteks pengisiannya dengan keluarga lain,” jelasnya. Cara kedua untuk mengatasi kendala pemahaman adalah dengan menekankan pendampingan pengawas di awal.

“Pengawas saya minta untuk mengambil sampel kuesioner yang sudah terisi. Lalu mereka memverifikasi sudah tepat pengisiannya atau belum. Agar tidak ada salah persepsi. Untuk data yang berbeda di masyarakat, saya minta mereka isi yang sebenarnya.” (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Menurut Koseka E, Regsosek ini sudah berjalan baik apalagi dengan pelibatan warga lokal sebagai PPL. Koseka mengungkapkan, “Kepala desa sangat mendukung. Malah berharap ini menjadi data yang

benar untuk jadi acuan dan dapat diverifikasi. Sebab bantuan-bantuan sebelumnya macet karena datanya kurang transparan.” Pernyataan dukungan perangkat desa di atas serupa dengan pernyataan langsung sekretaris desa yang mendukung Regsosek. “Saya dulu bolak-balik ke dinas sosial mengurus warga yang miskin seharusnya dapat bantuan tapi prosedurnya mereka kurang transparan. Semoga yang ini lebih transparan dan terintegrasi,” ujar sekretaris desa. Meski demikian, menurut Koseka, ia berpendapat bahwa beban kerja PPL terlalu besar bahkan satu PPL menangani 300 hingga 600 KK. “Meski pekerjaannya akhirnya dikerjakan berkelompok, beban kerja PML dan PPL terlalu besar menurutku.” sambungnya.

Ada dua warga yang juga memberikan respon yang positif terhadap Regsosek. Menurut mereka, penjelasan Koseka sudah cukup jelas. Dua dari tiga responden belum pernah mendapatkan bantuan sosial selain bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa saat pandemi. Warga F memberikan tanggapan bahwa ia menanggapi positif Regsosek ini. “Sudah bagus. Harapan saya ya nanti mungkin saya dan tetangga yang memerlukan dapat bantuan, seperti sembako. Meski nanti saya tidak dapat bantuan. Artinya belum rejeki saya,” ungkap warga.

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi terkait pelaksanaan Regsosek. Pertama, tanggapan positif petugas terkait dengan harapan mereka bahwa hasil Regsosek akan dimanfaatkan menjadi satu data yang dapat dipercaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kendala resistensi warga yang dialami disebabkan oleh persepsi dari oposisi kepala desa, mekanisme bantuan yang tidak jelas, dan kekhawatiran kebocoran data. Ketiga, petugas pendataan dan perangkat BPS berharap pada masa mendatang tidak ada lagi perubahan yang tidak diantisipasi di tengah proses pendataan, seperti penambahan aplikasi sebab infrastruktur teknologi informasi di pedesaan relatif terbatas. Keempat, warga mayoritas mendukung pendataan dan tidak banyak mengekspresikan kekecewaan pada bantuan yang belum tersalurkan. Kelima, koordinasi, pengisian

kuesioner, dan pengontrolan sampel hasil registrasi merupakan hal-hal yang krusial untuk menghindari kesalahan data.

## **E. Dukungan Kelembagaan Sosial dan Adat**

Kelembagaan Desa Dharma Tanjung terdiri dari kelembagaan sosial dan pemerintahan formal, seperti pemerintahan desa dan perangkat dusun. Partisipasi perangkat desa dan dusun dalam Regsosek cukup aktif dan mendukung. Kepala desa dan sekretaris desa diharapkan memiliki pemaknaan yang lebih dalam terkait Regsosek. Secara formal, desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang pada saat pengumpulan data dilakukan, merupakan seseorang yang ditugaskan dari kecamatan. Secara informal, terdapat tokoh masyarakat yang merupakan warga yang lahir dan telah tinggal lama di desa. Tokoh tersebut menjabat sebagai sekretaris desa dan banyak mendapat kepercayaan warga desa. Menurut tokoh masyarakat yang juga sekretaris desa tersebut, bantuan sosial yang diberikan pada masa-masa sebelumnya banyak yang salah sasaran. Bantuan-bantuan sosial tersebut sebelumnya tidak diberikan berdasarkan data yang diverifikasi penduduk setempat. Tokoh masyarakat mengungkapkan,

“Ini kan saya masuk ke pemerintahan desa yang baru. Dulu saya pernah berpengalaman menelusuri penanggung jawab bantuan sosial yang kebetulan dari luar desa untuk masyarakat Dharma Tanjung. Taunya masyarakat itu saya kepala desanya. Waktu saya coba cek bantuan program keluarga harapan (PKH). Saya merasa miris karena penerima bukan yang berhak. Namanya sama. Namun, karena ada tiga nama yang sama di desa ini jadi penerimanya bukan orang yang dimaksud meski namanya sama. Kalau diberikan ke yang lebih layak tidak apa-apa. Ini diberikan ke masyarakat yang sebenarnya dia mampu. Malah ada beberapa kartu yang ditahan karena tidak dapat diwariskan ke ahli waris, keluarnya juga lama. Waktu saya minta datanya, tidak diberikan. Bahkan pendamping mengaku tidak tahu. Seharusnya mereka



tanggung jawab. Ada tanggung jawab dari pusat.” (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

Sekretaris desa tersebut menyambut dengan senang ketika pendataan Regsosek dilakukan. Ia berharap bantuan-bantuan selanjutnya dapat tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian bantuan dapat lebih mudah.

“Dulu ada yang terkendala di penggesekan kartu. Itu saya antar dan mereka urus sendiri. Terakhir data PKH ada 1.044 KK, yang PKH ada 600 kartu, ke mana sisanya? Ternyata tidak dapat terlacak bahkan sampai ke pendamping dan Dinas Sosial. Semoga lebih baik untuk mekanisme bantuan dan pendataannya.” (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

Ketika ditanya mengenai resistensi warga terhadap Regsosek terkait dengan hal-hal yang bersifat politis, sekretaris desa menanggapi dengan lugas.

“Jangan takut, sekarang politik kita singkirkan. Sekarang pelayanan dahulu. Harus didata semua. Saya harap kejadian sebelumnya tidak terjadi lagi. Saya harap nanti penyalurannya lewat pos saja. Tidak lewat kartu sehingga tidak ada celah kecurangan.” (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

Celah-celah kecurangan pemberian bantuan tidak dapat dipungkiri dapat terjadi. Sekretaris desa menghimbau agar warga dapat melaporkan jika ada ketidaktepatan dalam proses pendataan dan pemberian bantuan nantinya. Tokoh masyarakat mengingat bagaimana bantuan-bantuan sosial sebelumnya yang diberikan dengan tidak transparan. Namun, apresiasi lebih juga ia ungkapkan pada mekanisme PPL dari warga lokal dan antusiasme PPL. “Saya salut dengan PPL yang bekerja sampai malam. Kayak begini kerja

lebih enak, dapat tahu keadaan. Kapan lagi hidup bertetangga. Jadi tahu tetangganya melalui Regsosek ini,” ungkap beliau.

Dukungan kelembagaan lainnya ditunjukkan oleh perangkat kelembagaan desa yang lain, yakni para kepala dusun. Kepala Dusun F menyambut baik proses Regsosek karena pendataan atau sensus yang sebelumnya tidak dilakukan oleh warga setempat. Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas keterlibatan warga setempat. Ia mempersepsikan berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa jika pendata ataupun pendamping bantuan bukan dari warga setempat maka bantuan menjadi kurang tepat sasaran.

Jejaring distribusi dan informasi mengenai Regsosek dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Kepala desa bersama perangkat BPS mensosialisasikan kegiatan Regsosek kepada perangkat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para kepala dusun. Berdasarkan struktur Regsosek, kepala desa dan para kepala dusun kemudian mendiskusikan daftar warga setempat yang dapat dilibatkan menjadi PPL. “Warga yang dilibatkan harus yang berkomitmen, tidak memiliki kesibukan yang padat, pendidikan minimal SMA, dan dapat mengoperasikan aplikasi android,” jelas seorang PML. Pada dasarnya, perangkat desa memiliki data warga yang pernah mendapatkan bantuan dan status sosial ekonomi warga berdasarkan pendataan sebelumnya. PPL D menjelaskan bahwa akan ada forum diskusi membahas hasil pendataan.

“Nanti pada akhir pendataan akan ada semacam *public hearing* lagi yang melibatkan kepala desa, kepala dusun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat meski sebenarnya dari data terkumpul itu sudah jelas dari indikator dan kategori sosial ekonomi setiap KK. Namun, perangkat desa memiliki wewenang untuk menentukan. BPS tidak dapat mengubah.” (Wawancara PML D, 1 November 2022)

Sosialisasi mengenai Regsosek di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dilakukan secara berbeda-beda. Beberapa warga yang terlibat kegiatan rapat pada

tingkat dusun sempat mendapatkan sosialisasi. Namun, mayoritas sosialisasi langsung diperkenalkan oleh para PPL. Sosialisasi dilakukan dengan cara sederhana dan dengan bahasa setempat yang mudah dipahami. Interaksi dengan masyarakat berjalan secara cair dengan menggunakan bahasa daerah. Beberapa warga mendukung proses Regsosek dengan memberikan data-data yang diperlukan. Warga juga membantu PPL sekiranya membutuhkan informasi rumah warga yang kurang dikenal oleh PPL. Seorang Koseka bahkan menjelaskan salah satu pengalaman unik mengenai antusiasme responden.

“Memang ada responden yang antusias sendiri mendatangi petugas sampai malam. Kemarin kami sudah berikan nomor urut, mulai dari Barat Daya. Nanti, oleh petugas dikunjungi satu per satu. Ada beberapa itu awalnya mereka tidak mau, ternyata mereka malah mengunjungi petugas ke kantor desa. Ternyata petugasnya tidak ada. Warga tersebut kemudian datang ke rumah. Ada sedikit *mis informasi*. Menurut warga ini menduga ada pencurian data. Mungkin dia takut. Tapi sudah dijelaskan dari tetangganya. Kemudian mereka minta dikunjungi lagi, tetangganya juga dikunjungi. Semuanya paham ini petugas dari desa dan BPS. Kalau dari masyarakat ya antusias. Ga tau mereka harap bantuan atau apa. Takut ketinggalan.” (Wawancara Koseka A, tanggal 1 November 2022)

Pengalaman tersebut juga dirasakan oleh PPL. PPL tersebut diikuti selama melakukan pendataan dan ditanya oleh warga kapan rumahnya didata. “Mungkin mereka takut tidak didata, tidak mendapat bantuan,” kata seorang PPL. Sistem pengawasan terhadap validitas data dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pelibatan PPL dari warga lokal yang mengetahui dan mengenal kondisi sosial ekonomi warga sehingga keterangan warga dapat diverifikasi PPL dan data yang dimiliki desa. Kedua, dengan supervisi PML yang mengontrol ketepatan pengisian kuesioner setiap tiga hari sekali. Ketiga, pelibatan perangkat desa nantinya dalam penggolongan kategori kemiskinan.

Mekanisme-mekanisme tersebut bukanlah jaminan untuk mendapatkan data yang valid sepenuhnya. PPL memiliki kelemahan untuk menelisik lebih jauh mengenai aset yang dimiliki warga selain dari pertanyaan dan aset yang terlihat. Selain itu, tidak dapat dipungkiri berdasarkan pernyataan salah satu perangkat BPS dan wawancara dengan kepala dusun, perangkat desa memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai standar kemiskinan. “Meski nanti di pengkategorian kuesioner sudah jelas mana warga yang miskin, perangkat desa diperbolehkan memiliki pendapat sendiri,” jelas seorang perangkat BPS. “Menurut saya kalau pendapatannya kurang dari Rp100.000,00/hari, satu keluarga itu dapat masuk ke kategori miskin. Sudah tidak mampu dia membiayai keluarga dengan jumlah tersebut,” ujar seorang kepala dusun. Setelah musyawarah yang melibatkan partisipan yang relevan, perangkat BPS berharap penggolongan dapat didapatkan secara valid dan terverifikasi data.

Penggunaan perangkat elektronik dan teknologi informasi juga memungkinkan partisipan yang relevan untuk melihat perkembangan pengumpulan data.

“Meski kadang pusat tidak tahu permasalahan yang terjadi di daerah, seperti teknik penggunaan aplikasi yang baru muncul di tengah-tengah proses itu. Mereka hanya memberikan tutorial video. Namun, penyesuaian di daerah sampai PPL sebenarnya lebih kompleks lagi,” (Wawancara Perangkat BPS A, 3 November 2022)

Kompleksitas penggunaan aplikasi, mencakup resistensi warga yang enggan memberikan izin untuk difoto bagian dalam rumahnya, PPL yang kurang familiar dengan aplikasi, dan sinyal yang tidak mendukung. Kurangnya informasi warga mengenai tujuan pendataan dan cara mengadvokasi diri terkait bantuan terkait dengan masalah utama di Kabupaten Sampang, yakni rendahnya partisipasi sekolah. Permasalahan lain adalah malnutrisi, tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur, serta rendahnya jumlah Posyandu dan Puskesmas jika dibandingkan jumlah penduduk.

“Untuk permasalahan indeks pembangunan manusia (IPM) bidang kesehatan sebenarnya sudah dikejar sejak lima tahun terakhir dan mulai membaik. Meski Kabupaten Sampang masih terendah. Strateginya adalah dengan pemberian insentif bagi petugas posyandu, pelarangan pernikahan anak, dan pemberian nutrisi.” (Wawancara Perangkat BPS A, 3 November 2022)

Meski demikian, Kabupaten Sampang masih menghadapi tantangan yang cukup sulit pada peningkatan sumber daya manusia. Perangkat BPS A menjelaskan bahwa ketika melaksanakan rapat dengan Bupati Sampang dan Bappeda Kabupaten Sampang mereka telah menyarankan untuk pemeratakan dan memaksimalkan program kejar paket. Mayoritas penduduk tergolong buta huruf dan putus sekolah sehingga target capaian indikator pendidikan masih terlalu rendah. Permasalahan-permasalahan tersebut diamini oleh salah satu perangkat desa atau Tokoh Masyarakat A. Latar pendidikan ini patut diperhatikan bagi petugas pendataan. Kondisi pendidikan responden merupakan petunjuk untuk penggalan pendataan.

## **F. Cerita dan Pemaknaan Hidup Para Pendata dan Tokoh Masyarakat untuk Perubahan Desa**

Terdapat tiga PPL yang mendampingi selama proses observasi dan wawancara proses bisnis Regsosek. Ketiga PPL tersebut memiliki profil yang berbeda-beda. PPL A yang berusia 35 tahun dengan ijazah pendidikan terakhir Sarjana, PPL B yang berusia 23 tahun dengan ijazah pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), dan PPL C yang berusia 30 tahun dengan ijazah pendidikan terakhir SMA. PPL tersebut termasuk ke dalam golongan generasi milenial dengan karakteristik *digital native* atau akrab dengan teknologi digital terbaru, memiliki kebutuhan akan validasi, serta memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang memberi makna meskipun gaji tidak terlalu tinggi (Liu dkk., 2019).

PPL A banyak membantu dalam menemui warga dan PPL lainnya. PPL A juga mendampingi dalam observasi aktivitas



Foto: Pratiwi (2022)

**Gambar 5.10** PPL sedang melakukan pendataan

nelayan warga. Melalui lorong-lorong sempit di desa nelayan, PPL A bercerita mengenai mata pencaharian dan kebiasaan warga. PPL A cukup memiliki kepedulian terhadap warga Desa Dharma Tanjung. Mengenai proses Regsosek, awalnya PPL A tidak mengetahui proses rekrutmen PPL untuk Regsosek ini.

Ia juga belum pernah memiliki pengalaman menjadi petugas survei. PPL dihubungi oleh kepala desa dan ditawari menjadi petugas Regsosek. Kepala desa memberikan dukungan melalui surat rekomendasi dengan menimbang kemampuan PPL. PPL bekerja sebagai guru bahasa Inggris pada semua madrasah di Desa Dharma Tanjung. Selain itu, PPL juga membantu orang tuanya dalam persewaan *sound system* jika ada pesta dan hajatan di desa. Dalam memaknai pekerjaannya sebagai guru dan petugas Regsosek, PPL A mengaku hidupnya lebih bermakna ketika dapat memberikan manfaat bagi penduduk desa. Apalagi, pada waktu itu tidak mudah mencari PPL yang berpendidikan dan mengenal banyak penduduk desa. PPL berharap agar data Regsosek ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan yang transparan dan tepat sasaran. “Selama ini bermanfaat untuk warga desa Dharma Tanjung, kenapa tidak?” ujarnya.

PPL A mengaku banyak belajar dalam memahami masyarakat dari proses pelatihan dan pelaksanaan Regsosek. PPL A mendapatkan target untuk mengumpulkan data pada 228 KK di Desa Dharma Tanjung. PPL A mengaku mendapatkan beberapa pemahaman tentang aspek-aspek dalam survei, seperti pengembangan, pendataan desa, cara meyakinkan masyarakat, dan cara menstimulasi partisipasi masyarakat. PPL A selalu mendapat pertanyaan oleh masyarakat, “Wah, mau ada bantuan apa lagi?” PPL A pun diikuti oleh warga yang rumahnya belum didata meski hanya menunggu urutan pendataan. PPL A mengakui bahwa mereka khawatir tidak mendapat bantuan jika tidak didata. Dalam menghadapi ekspektasi masyarakat, PPL A memberikan pemahaman bahwa pendataan bertujuan untuk mendata kondisi sosial ekonomi warga yang kemungkinan akan dijadikan bahan sasaran kebijakan untuk bantuan. PPL A juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka memberikan data yang sebenar-benarnya agar bantuan tepat sasaran. Meski demikian, masih ada responden yang memberikan informasi yang tidak benar setelah diverifikasi dengan data di tingkat desa, seperti informasi bantuan masa sebelumnya.

“Jika ada informasi yang tidak benar diberikan, saya *treat* begini, misalnya mereka bilang belum dapat bantuan, saya bilang ke mereka nanti *ga* dapat, *lho*. Kalau sebenarnya dia dapat tapi berkata *ga* dapat, dia yang rugi. Kalau untuk pertanyaan mengenai aset, kebanyakan responden *ga* mengaku mereka punya aset tertentu. Saya tulis yang benar dan yang saya tahu. Jika saya tidak tahu ya sesuai pengakuan responden saja.” (Wawancara PPL A, tanggal 1 November 2022)

Keunggulan Regsosek dibandingkan pendataan sebelumnya adalah pelibatan warga lokal sehingga pengumpulan data dapat lebih cepat dan terpercaya. PPL kedua, yakni PPL B. PPL B bekerja sebagai nelayan dan melaut bersama teman-teman sebayanya. Selama pendataan, ia berhenti melaut. Ia mengetahui informasi Regsosek dari

kepala desa dan tertarik bergabung dan menyerahkan KTP sebagai syarat.

Menurut PPL B, pendataan Regsosek dapat bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan dan menentukan solusi dalam persoalan kemiskinan. Dalam pengisian kuesioner, PPL B mengaku tidak memiliki kesulitan dalam memahami kuesioner. Proses pendalaman data ia lakukan dengan menanyakan aktivitas sehari-hari warga yang menjadi responden. “Sebenarnya waktu banyak dipakai untuk memberikan penjelasan mengenai Regsosek pada responden, bukan mengenai pengisian Regsoseknya sendiri. Ya harus bersabar,” ungkap PPL B. PPL B berharap pelaksanaan Regsosek dapat menjadi basis satu data dalam menanggulangi persoalan kemiskinan warga, terutama dari sisi pendidikan. “Saya dulu sering bolos sekolah untuk melaut. Jadi, seperti itu ya biasa di sini, Mba. Semoga hal ini semakin berkurang,” ujar PPL B. Secara geografis, PPL B tinggal di daerah nelayan.

PPL terakhir yang menjadi informan, yakni PPL C yang tinggal di daerah Utara desa. “Tunggu sebentar ya Ibu,” kata PPL C saat tim mendatangi kediamannya. Warga terlihat sedang membangun pondokan untuk berkumpul dan beribadah. PPL C tinggal di desa bagian Utara dengan mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Rupanya siang itu PPL C bergotong-royong bersama warga lain untuk membangun pondokan tersebut. “Ya begini di desa ini kalau ingin membangun rumah ataupun acara lainnya, kita lakukan secara bersama-sama,” Mata pencaharian PPL C adalah sebagai petani. Setiap hari ia bertani pada pagi hari kemudian memulai pendataan pada siang hari. Lokasi tempat tinggal PPL C berada pada Desa Dharma Tanjung bagian Utara di mana mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Banyak lahan pertanian yang sebenarnya tidak dimiliki oleh warga setempat. Warga setempat umumnya bekerja sebagai buruh tani. Jenis tanaman yang terlihat ialah kacang dan tanaman bambu. Selain bertani, warga di bagian Utara desa juga banyak membuat kerajinan keranjang sebagai bungkus dagangan ikan yang dijajakan di jalan pada sore hari maupun di pasar.





Foto: Pratiwi (2022)

**Gambar 5.11** Medan yang dilalui untuk menuju desa bagian Utara (kiri) dan proses unggah data aplikasi kedua (kanan)

PPL menyapa warga sekitar dan memberikan informasi bahwa ia sedang melakukan pendataan. Penduduk menyambut dengan menyajikan makanan lokal. “Ya begini kadang yang membuat lamanya survei itu di rumah warga banyak ditanya dan dijamu seperti ini. Jadi, kita makan dan banyak ngobrol dulu. Tidak apa-apa malah jadi lebih mengenal,” ujar PPL C. PPL C berharap setelah pendataan dilakukan, warga yang berhak mendapatkan bantuan segera mendapatkan haknya. Dari ketiga PPL tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki harapan besar agar data Regsosek menjadi basis data pemberian bantuan sosial lebih baik dan transparan.

PPL selanjutnya berusia 30 tahun. PPL menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Malang. PPL tersebut memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Desa Dharma Tanjung. PPL memahami situasi permasalahan sosial ekonomi warga desa. Informasi tersebut didapatkan dari tokoh masyarakat.

“Permasalahan perekonomian warga ini ada pada pendapatan nelayan yang tidak menentu. Mereka tergantung pada alam. Apalagi saat bulan Agustus ini sudah mulai menurun, musim angin dari Selatan. Petani pun juga begitu. Jantung perekonomian desa ini sebenarnya ada di pasar. Namun, sudah lama pasar ini

tidak beroperasi. Dulu, ada pasar tanjung di pinggir pantai, jika Jumat dan Selasa mereka berdagang dari hasil tani dan ternak. Sekarang tidak ada maka saya berfikir akan membangun pasar baru ke dalam. Mungkin dengan cara itu dapat mendobrak perekonomian masyarakat desa. Pasar ini nantinya juga dapat jadi tempat pelelangan ikan (TPI). Di bidang pertanian, kebanyakan warga lahannya sewa. Masyarakat desa terutama Utara ini hanya mengharapkan bantuan. Sampai saya rasa, apa iya yang diharapkan bantuan terus? Padahal jika punya usaha kan enak, tidak perlu berharap pada bantuan. Potensi yang dapat dimanfaatkan dari pertanian. Sayangnya, kebanyakan desa ini yang masih muda pergi keluar daerah. Pada mereka yang memiliki keahlian, pernah saya tanya mengapa tidak berjualan atau coba jualan wirausaha. Keluhan teman-teman saya yang tidak kembali ini karena tidak ada pasar. Kalau ada lahan insyaallah perekonomian desa lebih baik. Jika masih dibangun di pinggir jalan nanti macet. Saya malu kalau temen-temen dari Malang ketemu saya bertanya, apakah masih macet? Iya masih makanya ayo kita ubah.” (Wawancara Tokoh A, 3 November 2022)

Tokoh masyarakat mengakui pekerjaan rumah Desa Dharma Tanjung ini memang banyak, tetapi ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan.

“Dana desa dari pemerintahan sebelumnya sepertinya kurang maksimal dimanfaatkan. Dari dinas bilang, di perbatasan tanjung itu ada saluran yang membuat banjir, itu ada rel kereta api, sampah juga menumpuk. Akhirnya, saya diberikan tantangan oleh dinas untuk menyelesaikan masalah banjir. Alhamdulillah saya diberikan izin dan permasalahan banjir terselesaikan. Dinas sampai mempertanyakan kinerja camat sebelumnya maka dari itu sekarang dana desa sekarang difokuskan ke pembangunan lagi. Warga harus aktif semuanya. Jangan sampai ada genangan yang menimbulkan bintik demam berdarah.” (Wawancara Tokoh Masyarakat A, 3 November 2022)

PPL menyadari bahwa persoalan IPM di bidang kesehatan merupakan hal yang krusial. Beberapa strategi yang akan dilakukannya, yakni membangun saluran sanitasi umum, tidak memberikan izin untuk pernikahan anak di bawah umur, pemberian nutrisi pada ibu hamil, serta penambahan insentif bagi kader posyandu. “Katanya temen-temen, PKK, dan posyandu ini PR berat, saya sampai menekankan ke kader posyandu, jangan sampe bertele-tele, kerja *aja*, kalau minta ongkos *tak kasih*, dari dana desa ada untuk operasional, dulu tidak diberikan, makanya agak loyo dulu. Kalau sekarang jangan sampai begitu lagi,” ujarnya.

Berdasarkan cerita ketiga PPL dan tokoh masyarakat, pemaknaan partisipan pendataan terutama tokoh desa dan petugas pendata merupakan bagian kunci dari pendataan. Tokoh masyarakat dipandang memiliki kesadaran individu untuk memahami permasalahan di desa dan kesadaran kolektif untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Kehadiran tokoh masyarakat merupakan mitra pemerintah untuk melaksanakan berbagai program yang bersifat pemberdayaan dan penguatan kapasitas.

## **G. Cerita Keluarga Terdata**

Menurut Kepala Desa Dharma Tanjung dan data profil desa, 60% dari penduduk sebagai nelayan, 40% sebagai petani. Kebanyakan penduduk sebagai buruh nelayan dan buruh tani yang tidak memiliki kapal dan lahan sendiri. Hal tersebut membuat penghasilan warga bergantung pada alam. Beberapa warga lain mengungkapkan kekecewaannya ketika tidak mendapatkan bantuan disebabkan pada sumber penghasilan yang bergantung pada alam. Menurut salah satu Koseka yang juga warga setempat, terkait persoalan malnutrisi ini dikarenakan kebiasaan makan warga yang sederhana. Meski demikian, mereka memiliki aset berupa rumah dan ternak.

Keluarga pertama adalah keluarga Ibu S. Jarak rumah keluarga Ibu S tidak begitu jauh dengan balai desa dan jalan utama kabupaten. Rumah Ibu S terletak diantara lorong-lorong sempit di tengah

kampung nelayan. Rumah Ibu S berukuran kurang dari 20 meter persegi dengan dapur terpisah. Dinding rumah Ibu S terbuat dari bambu atau disebut dengan *gedek*. Sehari-hari, setelah bangun pagi, Ibu S beribadah salat subuh, menyiapkan makanan dan merawat suaminya yang sedang sakit. Jika ada permintaan, Ibu S bekerja sebagai pemijat bayi panggilan. “Penghasilan saya sebagai pemijat ya tidak tentu, kadang ada dan kadang tidak. Kalau tidak ada uang sama sekali, berhutang dulu atau makan seadanya,” ungkap beliau. Ibu S adalah orang tua dari kepala dusun. Sehari-hari pendapatan Ibu S berasal dari ongkos pijat, dari suaminya yang bekerja serabutan jika sehat, dan dari anaknya yang bekerja sebagai nelayan.

Pertama kali Ibu S mendapatkan informasi mengenai Regsosek dari putranya. Informasi yang didapatkan adalah pendataan mengenai rakyat, masyarakat, kerusakan rumah dan jalan, serta untuk tujuan pemberian bantuan. Ibu S mengaku tidak berharap banyak mengenai bantuan pemerintah sebab terkadang hal tersebut tidak dapat diprediksi. Ibu S pernah mendapatkan BLT desa. “Itu saja BLT yang saya dapat. Bantuan lain tidak dapat. Ya belum rejeki,” ujarnya. Menurut Ibu S, pendataan Regsosek ini penting kaitannya dengan bantuan masyarakat. Selama survei berlangsung, ia mengaku tidak kesulitan menjawab pertanyaan dari PPL. Sebab, seluruh pertanyaan ditanyakan dengan bahasa Madura dan dalam waktu singkat. “Ya paling hanya bertanya mengenai mata pencaharian, sekolah, dan yang lain. Kalau aset, kami tidak punya,” tambahnya. Selama proses pengumpulan data dengan Ibu S, PPL juga membantu menerjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menyiratkan pentingnya keterlibatan warga lokal sebagai PPL dan pada konteks Sampang masih banyak penduduk usia senior yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Ibu S mengaku tidak sungkan untuk mengobrol dengan PPL yang sudah dikenalnya. Ibu S berharap dari pendataan ini dapat memperlancar distribusi bantuan seperti sembako.

Responden kedua adalah Ibu R. Rumah Ibu R tidak jauh dari rumah Ibu S. Deru kendaraan yang lewat menemani suasana saat

tim berbincang dengan Ibu R, sebab rumah Ibu R berada tepat di pinggiran jalan kabupaten. Saat bertemu dengan Ibu R bercerita,

“Hari ini masak ikan layur dari hasil melaut. Tidak ada uang untuk beli sayur. Ikan dan nasi saja. Biasanya kalau ada uang, beli sayur ke pasar. Kalau tidak ada, saya biasanya ke Utara ambil daun kelor untuk disayur. Sehari-hari penghasilan dari hasil melaut suami dan anak-anak. Ada sebagian yang dijual. Kami tidak ada tabungan. Jadi hasil hari ini ya dimakan hari ini. Kebetulan ini cuaca sedang bagus, semoga nanti hasilnya baik.”  
(Wawancara Ibu R, 1 November 2022)

Selama hidupnya di Desa Dharma Tanjung, ia belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Ibu R mendapatkan informasi mengenai Regsosek dari PPL yang mendatangnya. Menurutnya, seluruh pertanyaan mudah dijawab. “Jawab apa lagi mbak? Emas tidak ada, perahu tidak ada, sapi, dan kebun juga tidak ada,” jawab Ibu R. Harapannya, pendataan ini dapat menjadi keterangan untuk menentukan penerimaan bantuan.

Selanjutnya, tim menuju rumah Ibu D. Ibu D sedang sibuk mengolah dan memisahkan ikan untuk dijual. Kuesioner survei dijawab dengan cukup singkat oleh Ibu D karena kondisi keluarganya tidak ada yang sakit dan ia juga tidak memiliki aset. Menurutnya, seluruh pertanyaan mudah dipahami. Setiap hari paling tidak Ibu D dapat menjual 25 kilogram ikan, meski terkadang ikan tersebut tidak habis dijual. Rata-rata penghasilan Ibu D, yakni Rp200.000,00 per hari. Jika hasil laut sedang bagus, ia mendapatkan uang hingga Rp300.000,00. Ibu D melelang harga ikan yang didapatkan dari nelayan. Anak Ibu D juga membolos sekolah untuk ikut melaut. “Sudah biasa itu (bolos sekolah) di sini,” ujarnya. Ibu D memiliki tiga anak. Anak bungsunya masih bersekolah SMA dan kedua lainnya sudah berumah tangga. Ibu D juga tidak banyak berharap dari pendataan survei ini terkait bantuan pemerintah.

Pada saat tim peneliti berbincang dengan Ibu D, hadir pula menantu Ibu D. Menantu Ibu D berusia sekitar 25 tahun dengan

pendidikan terakhir SMA dan suaminya berpendidikan sekolah dasar (SD). Ia menikah pada usia 18 tahun. Anak mereka yang berusia lima tahun memiliki berat badan yang kurang dari standar atau malnutrisi. Pola makan anak tersebut sehari-hari hanya mengonsumsi jajanan di warung. “Untuk memberikan nutrisi yang lebih baik, terkadang dia tidak mau makan. Hanya jajanan saja. Saya sebagai orang tua tidak mau memaksa,” ujarnya. Ia mengaku tidak pernah ikut Posyandu. Di sisi lain, penghasilan suaminya sebagai nelayan terkadang tidak dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi keluarga. Fenomena ini mengamini temuan Tahangnacca dkk. (2020) dan Akombi dkk. (2017) bahwa persoalan malnutrisi berasosiasi dengan pendidikan dan pengetahuan orang tua akan nutrisi dalam pola asuh dan kemiskinan. Temuan lainnya yakni rendahnya partisipasi pada layanan kesehatan, seperti Posyandu.

Dari desa nelayan, penelusuran data beranjak ke desa di bagian Utara, yakni desa petani. Salah satu informan di desa petani, yakni Ibu L. Pendidikan terakhir yang ditempuh Ibu L adalah setingkat SD. Mata pencaharian suami dan Ibu L adalah buruh tani. Seluruh pekerjaan domestik dilakukan oleh Ibu L, juga pekerjaan pencarian penghasilan tambahan lainnya. Ibu L sehari-hari juga berjualan soto mie sederhana dan rujak. Meskipun dagangannya tidak diperlihatkan secara terbuka di luar rumah, warga di sekitar dusun mengenal Ibu L yang berjualan rujak dan soto mie. Ibu L mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Ibu L memiliki anak sebanyak lima orang dengan yang paling bungsu berusia dua tahun. “Sebenarnya kami tidak berencana punya anak lagi, Mba. Tapi nyatanya muncul lagi si bungsu.” ujarnya. Namun, dua putranya yang lain bekerja di Jakarta dan sudah lulus SMK.

Enam bulan yang lalu putra Ibu L yang berusia dua tahun mengalami malnutrisi atau gizi buruk. Namun, setelah ia mengikuti program nutrisi makanan tambahan dan vitamin dari Posyandu, berat badan dan kondisi anaknya berangsur membaik. Berdasarkan penuturan Ibu L, pola makan keluarganya memang tidak seimbang.

“Biasanya hanya lauk berupa ikan dan nasi. Jarang mereka makan sayur atau protein lainnya,” ia menjelaskan. Ia berharap, dengan adanya Regsosek ini permasalahan warga, seperti sekolah dan kurang gizi dapat tertangani.

Dari seluruh informan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang menjadi responden pendataan mendukung Regsosek meski mereka tidak terlalu berharap dengan bantuan yang akan datang. Persepsi masyarakat masih menganggap Regsosek dengan bantuan. Pada sisi yang lain, permasalahan gizi buruk masih dijumpai pada desa lokasi penelitian. Partisipasi aktif kader dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Posyandu berkontribusi pada pengurangan angka kurang gizi pada Desa Dharma Tanjung. Hal penting lainnya adalah keterlibatan warga lokal sebagai pendata.

## **H. Penutup**

Salah satu permasalahan dalam pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data sehingga bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat miskin. Ketersediaan data yang akurat dan tepat menjadi akses program perlindungan sosial. Program-program bantuan sosial untuk rakyat mencakup program indonesia pintar (PIP), program jaminan kesehatan nasional (JKN-KIS), program keluarga harapan (PKH), & bansos rastra/bantuan pangan non tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Keluarga miskin adalah salah satu masalah yang dihadapi masyarakat, kemiskinan ini menjadi cermin ketidakmerataan sosial, pembangunan, dan pendidikan di seluruh Indonesia.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pendataan terhadap jumlah keluarga miskin di seluruh Indonesia. Dengan adanya ketersediaan data jumlah penduduk miskin ini maka diharapkan pemerintah akan dapat melakukan kegiatan pemerataan sosial dan ekonomi secara tepat dan

akurat. Melalui pendataan Regsosek diharapkan didapatkan data yang akurat dan tepat tersebut.

Dukungan berbagai pihak pelaksana Regsosek di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang mulai dari BPS Kabupaten Sampang, pihak kecamatan, desa, para kepala dusun, serta Koseka, PML, dan PPL telah mensosialisasikan kepada warga agar memberikan data yang sesuai kondisinya. Berbagai kendala di lapangan, seperti adanya penolakan pendataan terutama dari kalangan masyarakat menengah dan lawan politik Kepala desa atau menutupi jawaban pendataan khususnya tentang aset tidak menyurutkan semangat PPL untuk mendata. Adanya *image* pendataan dengan bantuan sosial terutama pada saat pendataan masyarakat miskin sudah menjadi pembicaraan rutin PPL.

Harapan masyarakat agar dilaksanakannya perbaikan data dan tidak ada lagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kelancaran tersebut tidak lepas juga dari PPL yang berasal dari warga lokal yang paham dan mengetahui kondisi masyarakat serta bahasa lokal sehingga mempermudah pendataan.

## Daftar Pustaka

- Akombi, B. J., Agho, K. E., Hall, J. J., Wali, N., Renzaho, A. M. N., & Merom, D. (2017). Stunting, wasting, and underweight in Sub-Saharan Africa: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(8), 863. <https://doi.org/10.3390/ijerph14080863>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. (2022). *Kecamatan Camplong dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Sampang. <https://sampangkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/418401207a8b001d0e90259b/kecamatan-camplong-dalam-angka-2022.html>
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Jawa Timur 2019–2024*. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. <https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/>



- wp-content/uploads/dokren/rpjmd\_jatim\_2019\_2024\_official.pdf
- Google. (t.t.). [Lokasi Kabupaten Sampang]. Diakses pada 5 Desember, 2022, dari <https://goo.gl/maps/GLbzkcHN2SaBZ6a96>
- Kukutai, T. & Thompson, V. R. (2015). Censuses, population: Comparative international aspects. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Ed*, 290–295. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.41004-4>
- Liu, J., Zhu, Y., Serapio, M. G., & Cavusgil, S. T. (2019). The new generation of millennial entrepreneurs: A review and call for research. *International Business Review*, 28(5), 101581.
- Tahangnacca, M., Amiruddin, R., Ansariadi, & Syam, A. (2020). Model of stunting determinants: A systematic review. *Enfermeria Clinica*, 30(4), 241–245. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.076>
- Thorvaldsen, G. (2017). *Censuses and census takers: A global history*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315148502>
- Wertheim, W. F., & Nitisastro, W. (1971). Population trends in Indonesia. *Pacific Affairs*, 44(1), 144–145. <https://doi.org/10.2307/2755870>